



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : STAF AHLI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADAN WILDAN**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG POLITIK, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN**
3. NHK : **72088**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m²/120 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/70 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 312.000.000

1. MOBIL, BMW 728I SEDAN Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, INNOVA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
6. MOBIL, NISSAN SEDAN SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 185.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 369.972.289**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.317.472.289



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.317.472.289

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.